



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 29 April 2021

Halaman: 3

Program Kotaku Kedepankan Konsep Padat Karya

JOGJA, Radar Jogja - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) kembali digulirkan pada tahun ini. Ditargetkan menasar sembilan kelurahan dengan mengedepankan konsep padat karya.

Koordinator Program Kotaku Kota Jogja, Raharja Mulya Atmaja mengatakan, konsep itu dibuat seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang belum usai. Sehingga dalam pengerjaannya dengan melibatkan masyarakat setempat yang terdampak. "Ya ada tiga bentuk program yang akan kami gulirkan," katanya Selasa (27/4).

Raharja Mulya menjelaskan, tiga bentuk program yang digulirkan masing-masing yakni, pekerjaan pemeliharaan terhadap infrastruktur kotaku yang sudah berusia lebih dari satu tahun. Pekerjaan atau pro-

gram reguler dan kolaborasi hibah Department of Foreign Affairs and Trades of Australian Government (DFAT). Adapun untuk program perawatan atau pemeliharaan ini menasar empat kelurahan yaitu Pakuncen, Purwokinan, Gunungketur, dan Muja-muju.

"Ini setiap kelurahan akan menerima dana Rp 300 juta," ujarnya.

Dari dana yang diperoleh kelurahan tersebut, 65 persen untuk membayar upah tenaga kerja. Sedangkan sisanya untuk pembelian bahan dan material. Pekerjaan pemeliharaan infrastruktur ini ialah seperti jalan, saluran drainase, sarana air minum hingga MCK. "Nanti tenaga kerjanya juga dipilih warga setempat yang terkena dampak pandemi seperti dirumahkan maupun dari keluarga pra sejahtera," sambungnya.

Sementara program reguler Kotaku

hanya menasar satu wilayah yakni di kelurahan Terban RW 10 dan RW 11. Fokus utama kegiatannya yaitu pengu-
rangan kawasan kumuh dengan nilai anggaran Rp1 miliar. "Posisi sekarang masih pra desain tapi pekerjaan fisiknya tetap tahun ini," jelasnya.

Sedangkan program kolaborasi hibah DFAT lebih fokus mengatasi tiga persoalan kawasan kumuh yakni air minum, sanitasi dan sampah. Sasaran pekerjaannya di empat wilayah yakni Prawirodirjan, Giwangan, Karangwaru, dan Baciro. Masing-masing wilayah nilainya mencapai Rp 2 miliar. Tahapan saat ini juga masih pra desain.

"Semua pekerjaan kami kedepankan dengan padat karya melibatkan tenaga kerja lokal. Semuanya pun dengan swa-
kelola," terangnya.

Team Leader Kotaku Jogja, M Imam

Santoso, menambahkan program Kota-
ku untuk Kota Jogja memiliki nilai manfaat terbesar. Total alokasi untuk DIJ tahun ini mencapai Rp 19,3 miliar, sedangkan Kota Jogja sendiri memperoleh Rp 10,2 miliar dengan total sasaran di sembilan kelurahan.

"Seluruh kelurahan yang terlibat dipilih dengan pertimbangan seperti dampak pandemi Covid-19 di masyarakat. Dan komitmen Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di masing-masing wilayah untuk menjalankannya," tambahnya.

Kendati sistemnya swakelola dan padat karya, namun aspek kehati-hatian tetap dikedepankan. Besaran upah tenaga kerja pun disesuaikan dengan standar wilayah di Kota Jogja yakni sekitar Rp 90 ribu per hari. Begitu pula untuk pembelian material disesuaikan dengan keterbukaan. (wia/bah/by)

Instansi	Nilai Berita
1.	...



TANPA KUMUH: Warga melintas di kawasan Karangwaru Riverside, Jogjakarta, Selasa (27/4). Karangwaru Riverside bisa menjadi salah satu rujukan penataan kawasan kumuh yang selaras dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005